



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI RAHAYU
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. NHK : 755012

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m²/92 m² di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 183.250.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 284.450.000

III. HUTANG Rp. 59.362.210

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 225.087.790

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.